



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 183 TAHUN
2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

b. bahwa untuk mendukung *Quick Wins* 100 Hari Program Kerja Kepala Daerah terpilih dibutuhkan tambahan kebutuhan regulasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 183 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 183 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 183 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MARULAH MATALI
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
183 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
1	Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian	Badan Kepegawaian Daerah	V				Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan, pemberian izin beristri lebih dari seorang, dan pemberian izin atau keterangan melakukan perceraian, Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti dan untuk selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur.	
2	Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah				V	<p>Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 2) Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Alasan: Simplifikasi materi muatan yang selanjutnya akan diatur dalam 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil,</p> <p>3) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Alasan: Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara,</p> <p>4) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Alasan: Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa tim penilai kinerja dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil,</p> <p>5) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional,</p> <p>Alasan: Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi</p> <p>6) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71004) Alasan : Substansi Peraturan Gubernur merupakan substansi teknis yang dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, yang memuat ketentuan teknis mengenai prosedur penyelenggaraan manajemen talenta dengan memperhatikan aspek potensial antara lain potensi, kompetensi, rekam jejak, pengembangan karir dan pertimbangan atasan</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
3	Pendelegasian Kewenangan di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah		V			Tindak lanjut atas evaluasi pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan kepegawaian.	Triwulan II
4	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Pencantuman Gelar	Badan Kepegawaian Daerah			V		Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.	Triwulan III
5	Mutasi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah			V		Penyesuaian ketentuan mengenai mutasi berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.	Triwulan III
6	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian pengaturan terkait penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP dan simplifikasi pengaturan pemberian TPP bagi guru.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
7	Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian beberapa Pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manajemen kinerja ASN dan perubahan ketentuan mengenai penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP bagi PPPK.	Triwulan II
8	Pengelolaan Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah		V			Menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait kewenangan khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat Pegawai Profesional Non-Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan III
9	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah				V	Penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan simplifikasi serta digitalisasi proses pemberian penghargaan masa kerja kepada PNS akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Triwulan III
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	V				Penyesuaian ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa digitalisasi ASN terintegrasi secara nasional dan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							pengaturan teknis mengenai digitalisasi manajemen ASN serta hasil penyusunan grand design sistem informasi kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	
11	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			V		Sudah tidak relevansi dengan situasi dan kondisi saat ini.	Triwulan I
12	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		V			Sudah tidak relevansi dengan situasi dan kondisi saat ini.	Triwulan III
13	Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring E-Order	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>4. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing Dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil Melalui Sistem E-order</p>	
14	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		V			<p>Tindak lanjut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memerlukan peraturan dalam pelaksanaan pembinaan kepada BUMD yang dilakukan oleh Kepala Daerah</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>ataupun pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan dalam mengambil keputusan.</p> <p>Untuk itu diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa Peraturan terkait pembinaan BUMD yang sudah ada selama ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMD 2) Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD 3) Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Daerah 4) Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan 	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>BUMD</p> <p>5) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan kepada BUMD</p>	
15	Pencabutan atas Peraturan Gubernur tentang Penugasan-Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				<p>Pencabutan atas Peraturan Gubernur terkait penugasanpenugasan pada BUMD yang telah selesai dilaksanakan dan telah habis masa berlaku penugasannya, antara lain:</p> <p>1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerjasama dengan BUMN dalam pengelolaan kawasan kota tua;</p> <p>2) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 52 Th 2022 tentang Penugasan kepada PT Transjakarta untuk revitalisasi</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>halte;</p> <p>3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan Gubernur Nomor 49 Th 2018 tentang Penugasan kepada Pasar Jaya untuk membangun Pasar di Kab. Adm. Kep. Seribu;</p> <p>4) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada BUMD untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi MBR;</p> <p>5) Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi PT Jaktour;</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>6) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah dalam kota/ITF;</p> <p>7) Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota; dan</p> <p>8) Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam penyelenggaraan perusahaan pembiayaan infrastruktur.</p>	
16	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Penyesuaian terhadap beberapa pasal atas masukan dan catatan atas hasil pemeriksaan BPK, antara lain:	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah						1) Pasal 23 dan Pasal 24 terkait pemberian fasilitas kendaraan kepada pengurus BUMD; 2) Pasal 19 terkait terkait Fasilitas Kesehatan bagi Pengurus BUMD; 3) Pasal 26 terkait fasilitas membership/corporate member bagi Pengurus BUMD; 4) Pasal 27 penyesuaian penghasilan atas perbaikan nilai pasar sesuai kondisi industry masing -masing BUMD.	
17	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Untuk Melakukan Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Penjelasan Kepala Biro Hukum dalam Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro PLH Nomor e-0511/HK.01.03 tanggal 22 November 2023 Hal Penjelasan Ranpergub tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
18	Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Adanya penambahan layanan baru Paljaya yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur antara lain layanan pengolahan lumpur tinja, layanan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3, air daur ulang dan sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	Triwulan III
19	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dalam Pengelolaan Rusunawa Pasar Rumput	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Pengelolaan rumah susun sewa pasar rumput untuk melayani masyarakat dengan kriteria tertentu dengan tarif non komersial sesuai aspirasi Pemprov DKI Jakarta. sebagai dasar hukum pelaksanaan dan dukungan yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya, diperlukan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
20	Pedoman Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Masukan dari Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memasukkan pengaturna terkait isi ruang lingkup minimal dalam pergub penugasan kepada BUMD	Triwulan III
21	Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Untuk Penyediaan Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Peurmahan dan Kawasan Pemukiman , menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KTPS/Mn/2024 Nomor 3015/KTSP/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah	Triwulan II
22	Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		V			Tindak Lanjut hasil Rapat Pimpinan tanggal 5 Desember 2024 dengan agenda pembahasan sarana jaringan utilitas terpadu	Triwulan I
23	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (perseroda) untuk Penyelenggaraan	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Tindak lanjut percepatan pelaksanaan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 sehingga dibutuhkan perubahan dalam ruang lingkup	Tiwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif						penugasan yang terkait dengan jangka waktu penugasan	
24	Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		V			Revisi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana	Triwulan IV
25	Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Turunan Perka BNPB No.12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Bencana	Triwulan IV
26	Perubahan atas Pergub 170 Tahun 2016 tentang Penggunaan Rambu Kebencanaan dan Sistem Penanggulangan Bencana pada Gedung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V		Menyesuaikan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
27	Regulasi tentang Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pascabencana Provinsi DKI Jakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Belum ada regulasi terkait pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Triwulan IV
28	Klaster Logistik Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana	Triwulan IV
29	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V				Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Triwulan IV
30	Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V		Kepgub DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2022	Triwulan IV
31	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
32	Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta . Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Banyunan Perdesaan dan Perkotaan atas Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dosen Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Melayani Kepentingan Umum di Bidang Keagamaan. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan Pertanian, Peternakan dan Perikanan</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
33	Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah	Triwulan II
34	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah 3. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penghapusbuku Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa dan Tidak Dapat Ditagih Lagi	Triwulan II
35	Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD)	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah	Triwulan I
36	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 201 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Perdesaan dan Perkotaan untuk Setiap Wajib Pajak	
37	Tata Cara Penerbitan, Pembetulan, dan Pembatalan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	V				Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	Triwulan II
38	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	Triwulan II
39	Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Pendelegasian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
40	Pemutakhiran Data Wajib Pajak/Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak	Badan Pendapatan Daerah	V				Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018	Triwulan III
41	Tata Cara Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Badan Pendapatan Daerah	V				Kebutuhan pengaturan karena ketentuan baru dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Triwulan III
42	Dasar Pengenaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	Badan Pendapatan Daerah	V				Pendelegasian Permendagri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat setiap tahun berjalan	Triwulan III
43	Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah		V			Pendelegasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Keuangan tentang Tara Cara Penilaian 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
44	Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah		V			Penyesuaian klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 saat ini. 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Triwulan I
45	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Pendelegasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah 2. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa	Triwulan III
46	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Satuan Kerja	Badan Pendapatan Daerah			V		Pendelegasian Perda Nomor 1 Tahun 2024 2. Penyempurnaan Pergub Nomor 47 Tahun 2024	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Perangkat Daerah dan/atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah							
47	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Triwulan I
48	Tata Cara Pemberian Rekomendasi atau Persetujuan Atas Permohonan Hak Atas Tanah di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah		V			1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan</p> <p>2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Bab XII pada Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre.</p>	
49	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah		V			<p>Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan regulasi pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	
50	Pemberian Remunerasi untuk Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.	Triwulan III
51	Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa Gedung Bangunan	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti temuan APIP pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11/-1.922.3.Reg tanggal 26 Desember 2019 serta untuk menjamin tepat waktu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah terjual melalui pemindahtanganan secara lelang.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
52	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah				V	Menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.34/5747/OTDA tanggal 16 Agustus 2022, hal fasilitasi Ranpergub tentang perubahan atas Pergub Nomor 75 Tahun 2021, di mana berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri ketentuan terkait pemberian BBM untuk kendaraan dinas cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Triwulan II
53	Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Jaringan Telekomunikasi	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas	Triwulan III
54	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Triwulan III
55	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			1. Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
56	Kebijakan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		<p>1. Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>2. Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Triwulan III
57	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat atau Mutlak	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				<p>1. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
58	Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
59	Analisis Standar Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
60	Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah.</p>	
61	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
62	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
63	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Mengganti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah dengan penambahan materi mengenai divestasi, pemberian pinjaman daerah, dan penerapan Penyertaan Modal Daerah yang lebih detail	Triwulan III
64	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Perkeretaapian	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit						Perkotaan Mass Rapid Transit memiliki keterbatasan dalam mengatur seluruh aspek pendanaan proyek MRT Jakarta. Pergub ini hanya mengatur mekanisme penarikan dana hibah, sementara mekanisme pendanaan lain seperti pinjaman pemerintah pusat belum diatur secara spesifik.	
65	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan layanan umum daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Triwulan III
66	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan III
67	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Terdapat perubahan kode akun dalam laporan keuangan sebagai dasar formula perhitungan kinerja keuangan BLUD.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah							
68	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pendapatan BLUD dari jasa layanan termasuk objek retribusi.	Triwulan III
69	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
70	Belanja Tidak Terduga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
71	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Hibah dari Pihak Lain Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
72	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran	
73	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V			Menindaklanjuti SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan, yang mana terdapat nomenklatur baru yaitu Tugas Belajar Mandiri dan karena telah dicabutnya Pergub Nomor 42 Tahun 2017	Triwulan II
74	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V			Menyesuaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan implemntasi pengembangan Jakarta Corporate University (JakCorpu)	Triwulan II
75	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Kegiatan Filantropi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
76	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan; 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Triwulan III
77	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan	V				1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
		Pembangunan Daerah					Nasional; dan 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.	
78	Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Tahun Jamak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
79	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V			1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
80	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
81	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
82	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
83	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Menindaklanjuti Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
84	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Triwulan III
85	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
86	Pedoman Implementasi Menyongsong Lima Abad Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Pedoman persiapan Acara HUT Jakarta ke 500 tahun.	Triwulan I
87	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V		Guna memastikan proses implementasi Satu Data Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti temuan BPKP RI Tahun 2023 bahwa Pemprov DKI Jakarta agar melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi pendukung penyelenggara SDI, maka perlu penyesuaian materi dalam peraturan gubernur dimaksud	Triwulan III
88	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Biro Hukum			V		Hasil evaluasi Biro Hukum terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Triwulan III
89	Pedoman Penyelenggaraan Rapat Pimpinan	Biro Kepala Daerah	V				Menindaklanjuti arahan pada Rapat Pimpinan tanggal 20 Februari 2025 serta penyesuaian Pergub Nomor 239 Tahun 2016 dengan Pergub Nomor 57 Tahun	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2022 sebagaimana terakhir diubah dalam Pergub Nomor 40 Tahun 2023.	
90	Perjalanan Dinas	Biro Kerja Sama Daerah		V			Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri perlu disimplifikasi menjadi Peraturan Gubernur yang memuat ketentuan Perjalanan dinas di lingkup Pemprov DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	Triwulan I
91	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Triwulan II
92	Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Amanat dari Kemendari pada Surat Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA Hal : Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia untuk	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia	
93	Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				V	Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah	Triwulan III
94	Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2025-2029	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Masa berlaku Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 sudah berakhir	Triwulan IV
95	Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Penyesuaian terhadap Reformasi Birokrasi Nasional	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
96	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta	Triwulan IV
97	Sistem Kerja	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Triwulan IV
98	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Biro Pemerintahan			V		Untuk menjamin kepastian hukum serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan di wilayah kota/kabupaten administrasi yang tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Triwulan II
99	Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	V				Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah	
100	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Lembaga Koordinasi Dakwah Islam	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			V		Penyesuaian masa tugas dalam 1 (satu) periode kepengurusan dan menghapus Pasal 28 terkait honorarium pengurus	Triwulan IV
101	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas	Dinas Bina Marga			V		Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas yang diselenggarakan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024	Triwulan I
102	Fasilitasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>Terdapat perubahan NSPK terkait penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha, mengacu pada beberapa peraturan antara lain:</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Pemanfaatan Ruang 8) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 9) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 10) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 11) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta	
103	Penyelenggaraan Kawasan dengan Panduan Rancang Kawasan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2017 tentang Pedoman Panduan Rancang Kota, Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit perlu disempurnakan	Triwulan III
104	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Jakarta	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Terdapat penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 - 2044, sehingga perlu penyesuaian terhadap muatan yang ada di dalam Rencana Detail Tata Ruang Provinsi Jakarta.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
105	Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020.	Triwulan II
106	Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>1. Dalam rangka percepatan penyelesaian kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya, dibutuhkan adanya pengaturan terkait penyederhanaan dan kemudahan perizinan pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR.</p> <p>2. Diperlukan revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
107	Insentif dan Disinsentif	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				<p>1. Dalam rangka menindaklanjuti amanah:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>2. Sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang</p>	
108	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>1. Perubahan regulasi akibat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemanfaatan Ruang, dan Jasa Konstruksi</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Pergub No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kota DKI Jakarta sebagai kota global sehingga diperlukan penyusunan kembali aturan mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	
109	Penyelenggaraan Reklame	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<p>1. Perubahan regulasi akibat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemanfaatan Ruang, dan Jasa Konstruksi</p> <p>2. Upaya mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota global, diharapkan mampu menjadi kota yang berperan penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional (menjadi primary node dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia,</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							gagasan, informasi secara global sekaligus membuka peluang dan memberi ruang untuk pelaku usaha	
110	Pedoman Standarisasi Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. 2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dilakukan standarisasi terhadap ketentuan dalam pengaturan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah 	Triwulan III
111	Efisiensi Energi pada Sektor Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Dalam rangka menindaklanjuti Aksi Prioritas 1 Climate Action Implementation (CAI) "Mengambil Tindakan Atas Peningkatan,	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Implementasi, Evaluasi dan Arah Strategis Kebijakan Bangunan Gedung Hijau DKI Jakarta" , diperlukan penyusunan regulasi yang memuat strategi pencapaian target pengurangan emisi GRK 30% pada tahun 2030 pada sektor bangunan gedung sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.	
112	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang, Bangunan Gedung, dan Jasa Konstruksi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban diperlukan tata cara dan mekanisme dalam pengenaan sanksi administratif dalam bidang penataan ruang, Bangunan Gedung dan jasa Konstruksi.	Triwulan III
113	Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perlu pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme Pemisahan Rumah Susun.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
114	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Nomor 97 Tahun 2021 belum optimal dilaksanakan oleh Walikota/Bupati dalam rangka penyelesaian kewajiban IPPR yang ditelantarkan dan/atau sudah dimanfaatkan oleh publik namun belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2. Pergub Nomor 97 Tahun 2021 perlu disempurnakan melalui penambahan ruang lingkup dan pengaturan terkait adanya kebutuhan pembiayaan dalam rangka percepatan proses penyelesaian kewajiban para Pemegang IPPR oleh pihak Walikota/Bupati 	Triwulan III
115	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan II
116	Peninjauan Tarif Retribusi Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Badan Layanan Umum Daerah 2. Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
117	Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	V				1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya	Triwulan IV
118	Pemajuan Kebudayaan Betawi	Dinas Kebudayaan	V				Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
119	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi	Dinas Kebudayaan			V		<p>1. Pada Pergub 197 Tahun 2015 terdapat Tugas Pokok dan Fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi yang tumpang tindih dengan Tupoksi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi</p> <p>2. Terdapat beberapa pasal yang perlu penyesuaian.</p>	Triwulan III
120	Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	V				Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Bangunan Cagar Budaya	Triwulan IV
121	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				V	Dasar pembentukan Pergub ini adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah dicabut dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024	Triwulan I
122	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi	Dinas Kesehatan				V	Berdasarkan masukan dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Dinas Kesehatan akan mengalihkan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	dan Kota/Kabupaten Administrasi						AIDS Kota/Kabupaten Administrasi ke Dinas Kesehatan mengingat secara kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah berakhir masa tugasnya berdasarkan Pasal 17A ayat (1) dan Pasal 17B Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	
123	Integrasi Layanan Kesehatan Berbasis Kompetensi	Dinas Kesehatan	V				Pasal 820 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan layanan	Triwulan I
124	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan			V		Kebutuhan perangkat daerah dalam meningkatkan ketetapan sasaran pemberian bantuan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
125	Remunerasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			Penggabungan terhadap revisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah khususnya terkait penambahan nomenklatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, terkait pemberian insentif bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 	Triwulan II
126	Peninjauan Tarif Retribusi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			1. Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Peninjauan terhadap beberapa tarif retribusi yang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan gubernur, diantaranya terkait Tarif Pelayanan Rumah Sakit Daerah, Tarif Layanan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah, Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dan Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan Daerah	
127	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasa Boga	Dinas Kesehatan				V	<p>Materi muatan pokok dalam Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain:</p> <p>1. Tata cara (administrasi, teknis, uji laboratorium, dan penilaian mandiri) penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sama dengan materi muatan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Sektor Kesehatan</p> <p>2. Pelatihan kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>3. Kewenangan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	
128	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur beserta Istri/Suami	Dinas Kesehatan			V		Pelayanan kesehatan bagi mantan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dilaksanakan tetapi belum memiliki petunjuk pelaksanaan terhadap layanan tersebut, dan layanan yang diberikan merupakan manfaat yang sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud	
129	Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			V		Hasil evaluasi dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dan adanya perubahan prosedur dan persyaratan teknis lalu lintas hewan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan pada beberapa pasal	Triwulan II
130	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	V				Lanjutan dari proses Ranpergub SPM Pusyankeswannak / Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD	Triwulan I
131	Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
132	Tata Cara Pengelolaan Domain dan subdomain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV
133	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			V		Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV
134	Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Tindaklanjut rekomendasi evaluasi pelaksanaan persandiaan untuk pengamanan informasi Pemda	Triwulan III
135	Tata Kelola Sistem Close Circuit Television di Tempat Umum dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Manage Service CCTV	Triwulan II
136	Penyesuaian Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup			V		1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>kembali paling lambat 3 tahun sekali dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>2. Bahwa dibutuhkan penyesuaian terhadap retribusi pelayanan kebersihan pada jasa pengolahan sampah pada:</p> <p>a. Fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan TPST Bantargebang, dimana saat ini nilai retribusi tersebut belum diatur.</p> <p>b. Penyesuaian harga jual material daur ulang dengan mempertimbangkan harga pasar saat ini.</p>	
137	Pedoman Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan Sensor	Dinas Lingkungan Hidup	V				Perlu pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pemasangan sensor kualitas udara di Jakarta	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
138	Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	V				<p>1. Telah tersusunnya Kajian dokumen Perencanaan (roadmap) Pengelolaan Limbah 83 yang bersumber dari fasyankes, Usaha Skala kecil (USK) dan rumah tangga di tahun 2022.</p> <p>2. Telah tersusunnya kajian Rencana induk pengelolaan limbah 83 ditahun 2023.</p> <p>3. Diperlukan penetapan terkait dengan rencana induk yang dimaksud agar dapat dipedomani OPD, instansi dan stakeholder terkait</p> <p>4. Pembahasan ranpergub belum masuk ke dalam fasilitasi Kemendagri di tahun 2024 sehingga diperlukan pengusulan kembali ditahun 2025</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
139	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis dari Fasyankes	Dinas Lingkungan Hidup	V				<p>1. Dalam rangka menjawab hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jakarta atas kinerja pengelolaan limbah 83 medis Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan.</p> <p>2. Adanya kebutuhan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di wilayah DKI Jakarta dimana belum adanya aturan daerah mengenai pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasyankes.</p> <p>3. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis wilayah</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
140	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	V				<p>1. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan BLUD yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif (sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilai);</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat(2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pola tata kelola, rencana strategis, dan standar pelayanan minimal pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p>	Triwulan III
141	Pelayanan Kebersihan Untuk Rumah Tinggal dan Kegiatan Wajib Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan	Dinas Lingkungan Hidup	V				Telah tersusunnya dokumen kajian skema Pembiayaan Pengelolaan Sampah dan diperlukan Regulasi Turunan dari Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa Rencana Pembentukan	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Pemantauan Lingkungan Hidup						Peraturan Gubernur yang digunakan sebagai regulasi terhadap implementasi lapangan atas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.	
142	Pedoman Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	V				Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dengan kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah, dan tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Triwulan II
143	Layanan Gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional, Museum, dan Taman Impian Jaya Ancol pada Hari Biasa Bagi Masyarakat Tertentu	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		V			Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur 2025- 2030	Triwulan I
144	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun	Dinas Pemberdayaan,				V	Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja	Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk					2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
145	Tata Cara Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Triwulan III
146	Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Triwulan III
147	Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan		V			Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
		Pengendalian Penduduk						
148	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		V			Penggabungan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Triwulan IV
149	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			V		Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait hasil evaluasi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan uji petik pada Kota Administrasi Jakarta Timur	Triwulan IV
150	Pos Pelayanan Terpadu	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan	V				Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu yang sebelumnya berupa unit kegiatan bersama	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
		Pengendalian Penduduk					masyarakat yang mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat bertransformasi menjadi pelayanan dalam 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal	
151	Rencana Aksi Daerah Kepemudaan Tahun 2023-2026	Dinas Pemuda dan Olahraga			V		Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Triwulan II
152	Desain Olahraga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga	V				Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 2. Pasal 19 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah	Triwulan II
153	Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Aspirasi Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga	V				Dasar hukum pelaksanaan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana olahraga yang berasal dari aspirasi masyarakat	Triwulan III
154	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		V			1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
		Terpadu Satu Pintu					<p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah" dan Pasal 11 ayat (1) "tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah"</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 350 ayat (5) "Lepala Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan perizinan berusaha secara elektronik"</p> <p>3. berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2024 terdapat kewenangan khusus terkait dengan subbidang data dan sistem informasi penanaman modal sehingga berimplikasi terhadap penyusunan peraturan gubernur tentang pelayanan perizinan secara elektronik</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>maka dari itu pasca penetapan presiden terkait dengan perubahan ibukota maka diperlukan penyesuaian kekhususan terkait dengan pelayanan perizinan secara elektronik</p> <p>4. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik sudah tidak sesuai dan perlu diganti dalam rangka memastikan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang andal dan memberikan kepastian hukum dengan didukung teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem elektronik yang dikembangkan pemerintah pusat dan perangkat daerah</p>	
155	Pedoman Investigasi Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V			Menyesuaikan dengan regulasi terbaru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	
156	Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V			Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran di daerah.	Triwulan IV
157	Bantuan Sosial Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan	V				Dasar pelaksanaan untuk perubahan tata kelola KJP dan KJMU, mendukung 100 (seratus) hari Program Gubernur dan Wakil Gubernur, mencabut Peraturan Gubernur terkait KJP dan KJMU	Triwulan II
158	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan				V	Pasca diundangkannya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sitem Penerimaan Murid Baru, diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) bahwa Petunjuk Teknis SPMB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka diperlukan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	Triwulan II
159	Sekolah Swasta Gratis	Dinas Pendidikan	V				Dasar Hukum pelaksanaan Sekolah Swasta Gratis berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022. PP 57 Tahun 2021 PP 48 Tahun 2008 j.o PP 18 Tahun 2022 , dan Permendikbud 18 Tahun 2023	
160	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan			V		<p>1. Penyesuaian nomenklatur Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri menjadi Sanggar Kegiatan Belajar sesuai Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>2. Penyesuaian materi muatan terkait pendirian dan perubahan untuk Satuan Pendidikan Negeri</p>	Triwulan II
161	Pendidik Kontrak Kerja Individu pada Satuan Pendidikan Negeri	Dinas Pendidikan		V			1. Penataan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara harus segera diselesaikan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Aparatur Sipil Negara</p> <p>2. Peralihan Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja Individu menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan</p> <p>3. Penyesuaian dan peralihan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari Dinas Pendidikan kepada Suku Dinas Pendidikan.</p> <p>4. Mencabut beberapa peraturan gubernur. meliputi:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri;</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri; dan</p> <p>c. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri</p>	
162	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan			V		<p>1. Penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terkait rincian tugas dan tanggung jawab penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>2. Penyesuaian materi muatan untuk mengatur penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							pendidikan beserta tugas dan tanggung jawab tiap perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah agar tersedianyapedoman penyediaan, pemeliharaan, perawatan prasarana pendidikan	
163	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan			V		Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kebijakan Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan terkait pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan satuan pendidikan	Triwulan III
164	Pemberian Layanan Angkutan Umum Gratis Bagi Masyarakat	Dinas Perhubungan	V				Rencana penerapan kebijakan pemberian layanan angkutan umum gratis bagi 15 (lima belas) golongan masyarakat pada layanan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan Lintas Raya Terpadu (LRT) yang merupakan salah satu quick wins/program 100 (seratus) hari Gubernur yang sesuai timeline akan	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							launching pada minggu ketiga bulan Mei Triwulan II.	
165	Penderekan Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	V				<ol style="list-style-type: none"> berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 66 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur adanya gugatan hukum yang pernah dilayangkan oleh pelanggar ke Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan penindakan kendaraan yang parkir tidak ada tempatnya dengan penderekan karena belum adanya Peraturan Gubernur mengenai penderekan kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pendalaman dan kajian dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bahwa penderekan kendaraan bermotor 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor akibat pelanggaran parkir tidak pada tempatnya tidak dapat dikenakan retribusi melainkan dikenakan denda/sanksi administratif</p> <p>4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi menyebutkan penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp500.000/hari/kendaraan</p> <p>5. mengalir point 3 dan 4, pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk tarif retribusi atas penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan parkir dihapus dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 karena tidak sesuai dengan definisi retribusi sehingga</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							akan dialihkan ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD)	
166	Ruang Pengamanan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, jalur kereta api terdiri dari Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api; 2. bahwa dalam Ruang Manfaat jalur Kereta Api terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas dan bawah jalan rel; 3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, bahwa pemanfaatan Ruang Milik Jalur Kereta Api tidak boleh membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jasa kereta api; 	Tiwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyiampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							4. bahwa untuk mengamankan ruang milik jalur kereta api, maka perlu dilengkapi dengan ruang pengamanan perkeretaapian	
167	Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan	Dinas Perhubungan	V				<p>1. sesuai dengan amanat UU 23/2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 11 : Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:</p> <p>a. Pemerintah untuk rencana induk perkeretaapian nasional;</p> <p>b. Pemerintah Provinsi untuk rencana induk perkeretaapian provinsi; dan</p> <p>c. pemerintah kabupaten/kota untuk rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>2. sesuai amanat Perda 5.2014 tentang Transportasi yang terdapat pada:</p> <p>1) Pasal 148 ayat (3);</p> <p>2) Pasal 153 ayat (3);</p> <p>3) Pasal 157 ayat (4);</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							4) Pasal 159 fan Pasal 164; 5) Pasal 165 ayat (3); 6) Pasal 169 ayat (2) 7) Pasal 174 d. sebagai turunan dari Rencana Induk Transportasi Jakarta 2025-2045 e. Naskah Akademik dan Ranpergub RIPP telah tersedia dan akan segera diajukan setelah RITJ disetujui oleh DPRD menjadi Perda RITJ.	
168	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	Dinas Perhubungan	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) perlu meentapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
169	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 244 ayat (4); 2. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi kota Provinsi DKI Jakarta; 3. Proses seleksi DTKJ mengacu pada Pergub tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 periode. Dalam perjalanan proses seleksi dirasa perlu ada penyesuaian Pergub dikarenakan Pergub tersebut kurang memadai.kurang lengkap dalam hal proses seleksi sehingga pembaharuan dan penyempurnaan. 4. Status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta menjadi dasar penguatan peran dan fungsi DTKJ untuk dapat memberikan saran masukan untuk percepatan pencapaian Jakarta sebagai kota global yang kompetitif 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
170	Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Perhubungan	V				<p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan; 2. Permenhub 15/2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 3. Permenhub 45/2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik; 4. Permenhub 87/2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; 5. Permenhub 44/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub 86/2020 tentang Perubahan atas Permenhub 44/2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan 	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik</p> <p>6. Permenhub 19/2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>7. Perda 5/2014 Pasal 53 ayat 1 s.d. 4:</p> <p>(1) setiap kendaraan bermotor umum dan kendaraan dinas operasional pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.</p> <p>(2) bahan bakar ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan bakar gas, listrik, hybrid biofuel atau bahan bakar minyak berstandar paling sedikit euro-3.</p> <p>(3) terhadap penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan bea balik nama.</p>	

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
171	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan	Dinas Perhubungan			V		Peralihan perizinan penyelenggaraan perparkiran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan III
172	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola Oleh Pemerintah	Dinas Perhubungan			V		Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 Pasal 7 bahwa Kepala Unit Pengelola Perparkiran melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 2 (dua) tahun sekali.	Triwulan III
173	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran	Dinas Perhubungan			V		Berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran Bab VI Evaluasi dan Pelaporan Pasal 8 ayat (1) Pemberian Remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai unit pengelola dievaluasi setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
174	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Angkutan Perairan	Dinas Perhubungan	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) perlu emnetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal	Triwulan III
175	Tarif Layanan Angkutan Penumpang Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan		V			<ol style="list-style-type: none"> 1. amanat Perda 5 Tahun 2014 tentang transportasi, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) dimana perlu diselenggarakan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur 2. Gabungan dari 2 propempergub di tahun 2024 yang belum selesai yait Rapergub pelayanan gratis transjakarta (insentif layanan angkutan umum) dan rapergub tarif angkutan umum (satu moda) 3. tarif angkutan umum transjakarta belum ditetapkan dalam bentuk pergub,masih tertuang dalam Kepgub Nomor 1912 Tahun 20005 tentang penetapan tarif angkutan penumpang 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>dengan mobil bus umum transjakarta-busway di DKI Jakarta</p> <p>4. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapi Transit, Pasal 10 ayat (6), tarif layanan sistem BRT dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun sedangkan ketentuan mengenai tarif layanan angkutan transjakarta (satu moda) belum terdapat penyesuaian sejak tahun 2005.</p> <p>5. tarif integrasi angkutan umum belum ditetapkan dalam bentuk pergub, masih tertuang dalam kepgub 733 tahun 2022 tentang besaran paket tarif layanan angkutan umum massal</p>	
176	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan			V		<p>1. amanat Perda 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 136 dimana perlu ditetapkan tarif angkutan umum bersubsidi dengan formulasi penghitungannya</p> <p>2. beberapa pasal dalam Pergub 46 Tahun 2022 membutuhkan</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>penyesuaian untuk menghasilkan subsidi yang efektif dan efisien</p> <p>3. temuan hasil pemeriksaan BPK yang berulang karena ketidaksesuaian dengan Pasal dalam Pergub 46 Tahun 2022</p> <p>4. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK</p>	
177	Alat Mobilitas Personal	Dinas Perhubungan	V				<p>1. teknologi transportasi yang berkembang dengan pesat dan adanya alat mobilitas personal yang sudah sangat massif penggunaanya di Provinsi DKI Jakarta sehingga diperlukan rapergub alat mobilitas personal sebagai tindak lanjut dan menjamin kepastian hukum serta memenuhi beberapa aspek keselamatan, keamanan dan ketertiban operasional alat mobilitas personal</p> <p>2. Rapergub sudah pernah diajukan dari tahun 2022 dan di tahun 2024 sudah diparaf serta sampai Wakil Gubernur namun dikembalikan oleh Pj Gubernur untuk diupdate nama</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>penandatangannya dan aturan hukum terkait lainnya</p> <p>3. turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik</p>	
178	Tarif Layanan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V				<p>1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat 6 bahwa Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, namun saat ini Tarif Layanan UPK PPUKMP Pulogadung masih menggunakan Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2003 tentang Ketentuan Sewa kontrak Penggunaan Lahan dan/atau Fasilitas Kerja di Lingkungan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>2. Besar tarif layanan sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting.</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
179	Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pengendalian Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada UPK PPUKMP Pulogadung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V				Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa salah satu persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pola tata kelola, rencana strategis, dan standar pelayanan minimal.	Triwulan III
180	Penyesuaian Tarif Retribusi Atas Penggunaan Tempat Usaha Pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil audiensi dan menindaklanjuti aspirasi para pedagang / PKL atas tingginya kenaikan tarif retribusi pada Perda 1 Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud; dan 2. Merujuk pada ketentuan pasal 94 Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilakukan peninjauan tarif retribusi dan melakukan mekanisme penyesuaian tarif yang ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Gubernur) 	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
181	Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V				<p>Simplifikasi beberapa peraturan gubernur, meliputi:</p> <p>1) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum</p> <p>2) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Layanan Perpustakaan Digital</p> <p>3) Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus</p> <p>4) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah</p>	Triwulan I
182	Prasarana dan Sarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		V			Pasal 101 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
183	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			V		Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah	Triwulan IV
184	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			V		Program Quick Wins terkait Aktivasi Taman 24 Jam	Triwulan II
185	Mekanisme Penghunian Rumah Susun Umum Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			Penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Triwulan I
186	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2025-2045	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP. 2. Sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dokumen panduan yang mengatur terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan 	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyiampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							sebagai produk hukum. 3. Progres sampai dengan Oktober 2024 : pembahasan substansi pergub dengan Biro PLH. 4. target penyelesaian draft pergub adalah pada akhir Oktober 2024	
187	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			1. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. 2. Pembentukan Peraturan Gubernur diharapkan dapat menjadi payung hukum kegiatan pengelolaan pengalihan Unit Sarusun Hunian Terjangkau Milik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
188	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, dengan pertimbangan hasil Kajian Penyusunan Tarif Layanan Dana Perumahan yang disusun oleh Universitas Pelita Harapan direkomendasikan skema bagi hasil yang tertuang dalam Pergub 80/2019 pasal 3 poin (a) perlu untuk diubah. Berdasarkan analisis struktur biaya dan analisis struktur pendapatan disimpulkan bahwa UPDP sebagai BLUD dapat mencukupi biaya operasionalnya dengan cara mengoptimalkan penempatan dana FPPR. Selain itu, sebagai strategi untuk menarik minat Bank Pelaksana untuk dapat berpartisipasi dalam Program Hunian Terjangkau Milik.	Triwulan III
189	Pengembangan Dana Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				Skema investasi yang bertujuan untuk optimalisasi Dana FPPR sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendapatkan hunian yang	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							layak dana terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	
190	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	V				Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 14, Pasal 20 ayat (7), Pasal 22, Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 38, Pasal 42, Pasal 44 ayat (3), Pasal 53, Pasal 61, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 79, Pasal 82, Pasal 93, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 113 ayat (3), Pasal 116, Pasal 125, Pasal 126 ayat (3), Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Triwulan IV
191	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial	Dinas Sosial			V		1. Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dengan rincian perubahan sebagai berikut:	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<ul style="list-style-type: none"> Menghapus Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja Yang Orang Tua atau Wali Meninggal Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019, karena berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 dan berubah status menjadi endemi di Indonesia dan DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 669 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Terkait Corona Virus Disease 2019 Sebanyak 3 (tiga) Keputusan Gubernur; dan 2. Perubahan pada kriteria penerima bantuan sosial berdasarkan kebijakan maupun aturan dalam Peraturan Perundang-undangan 	
192	Pedoman Pengangkatan Anak	Dinas Sosial		V			Menyesuaikan materi muatan mengenai bimbingan, pengawasan, dan pelaporan	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
193	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial	V				Pengelolaan data berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Triwulan IV
194	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial			V		<p>1. Dinas Sosial telah membuat kajian sederhana tentang pentingnya Karang Taruna tingkat kecamatan menerima bantuan pendanaan berupa biaya operasional tiap bulannya</p> <p>2. Penyesuaian materi muatan terkait pendanaan Karang Taruna tingkat kecamatan diberikan melalui mekanisme hibah</p>	Triwulan IV
195	Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial		V			1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan ("Permensos 5/2024) yang berisi pengaturan mengenai	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Lembaga Kesejahteraan Sosial, baik dari sisi perizinan maupun organisasinya, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Prosedur Pemberian Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu untuk diganti.</p> <p>2. Permensos 5/2024 memberi tenggat waktu kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk melakukan penyesuaian terhadap perizinan yang diterbitkan agar disesuaikan dengan Permensos 5/2024 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Permensos 5/2024 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2024.</p>	
196	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan	Dinas Sumber Daya Air			V		<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
	Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah						Daerah, Pasal 68 ayat (1); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 15 ayat (3); 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Pasal 12; 4. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, perlu diubah karena tidak dapat diimplementasikan secara maksimal	
197	Zona Bebas Air Tanah (Penggantian Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah)	Dinas Sumber Daya Air		V			1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							<p>Pasal 9 ayat (1);</p> <p>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL/01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, Lampiran II Nomor 11;</p> <p>3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah, perlu diubah karena kewenangan pengawasan izin pengusahaan air tanah dilakukan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	
198	Pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi	V				Surat Edaran Bersama 4 Menteri tentang penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
199	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi				V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 	Triwulan II
200	Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Inspektorat	V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyatuan Pergub No 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Kepgub Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko 2. Penguatan lini kedua dalam penerapan manajemen risiko untuk isu startegis 	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							3. Penambahan Substansi materi contoh-contoh dalam melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko	
201	Standarisasi Bangunan Kantor Satpol PP Kota, Kabupaten dan Kecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja	V				<p>1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP</p> <p>2. Pergub Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung</p> <p>3. Perlu ada standar konstruksi bangunan dan ruangan yang mendukung keselamatan, kemudahan, kenyamanan dan kelayakan khusus bagi Satpol PP tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan</p>	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
202	Standar Operasional Prosedur Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Pol PP	Triwulan I
203	Peningkatan Pemahaman Peraturan Daerah di Lingkungan Sekolah	Satuan Polisi Pamong Praja	V				Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum	Triwulan I
204	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI dan Polri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja			V		Penyesuaian standar honorarium bagi komando pengendali sesuai struktur TNI dan Polri	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
205	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara Yustisial dan Non Yustisial	Satuan Polisi Pamong Praja	V				1. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 2. Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan perda dan perkada secara Yustisial dan perubahan karekteristik Kota Jakarta ke depan	Triwulan II
206	Pemberian Penghargaan, Tata Cara Upacara Pemakaman dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	V				Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satpol PP	Triwulan IV

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


 MARULAH MATALI
 NIP 196511271996031003